

**EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI KABUPATEN SIMEULUE**

Reci Muliani¹⁾, Nodi Marefanda²⁾

¹⁾²⁾Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar
Email: recimuliani@gmail.com, nodimarefanda@utu.ac.id

Abstract

The aim of this study was to determine the effectiveness level of DP3AKB's performance in preventing stunting in Simeulue District. This research was carried out at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning in Simeulue District. This research is a descriptive qualitative research where the research is carried out directly aimed at the informants as research objects. Data collection techniques were carried out in a triangulation (combined) manner, data analysis was inductive in nature, and the results of qualitative research emphasized meaning rather than generalization. The results of the study show that aspects of the duties or functions of the DP3AKB institution in preventing stunting in Simeulue Regency have been carried out effectively and the implementers have been carried out properly. Based on research, the effectiveness of the implementation of the Acceleration of Stunting Reduction program is quite effective because there are already cadres such as Toddler Family Development and outreach to the community about the program so that parents understand how stunting is prevented.

Keywords: *Effectiveness, Performance, Stunting*

PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue pada awalnya merupakan salah satu bagian di Setdakab yaitu bagian dari Pemberdayaan Perempuan, dimulai pada tahun 2002, berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, dan berubah menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PPKS) berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Simeulue, Lalu berubah lagi menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di singkat dengan DP3AKB berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah kesehatan

yang kompleks termasuk keterlambatan perkembangan (RISKESDAS 2022). Stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hingga melampaui -2 SD (Standar) di bawah median panjang berdasarkan tinggi badan menurut usia. Stunting menggambarkan suatu keadaan malnutrisi yang kronis dan anak memerlukan waktu untuk berkembang serta pulih kembali menuju keadaan tinggi badan anak yang normal (WHO, 2022).

Berdasarkan hasil riset Hindratni, F., at all, didapatkan pada tahun 2017, sekitar 22,2% atau 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Indonesia masih cukup tinggi 36,5%, melampaui batas non public health WHO yaitu 20% (Widanti, 2017).

Data Prevalensi balita stunting yang dikumpulkan WHO menunjukkan bahwa Indonesia termasuk kedalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/ *South-East Asia Regional* (SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting

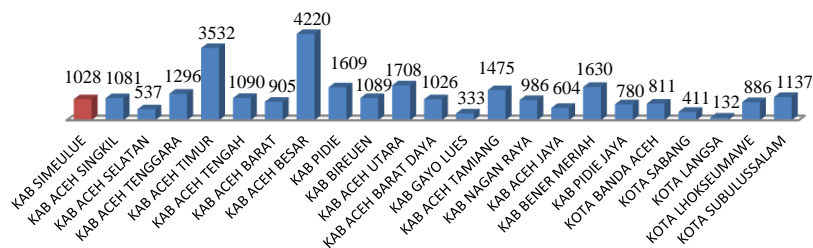
di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4% (Saputri & Tumanger, 2019).

Mengingat dampak dari stunting tidak bisa dinomorduakan sehingga masalah keterlambatan perkembangan memang cukup fatal dapat menimbulkan efek jangka pendek bermanifestasi sebagai risiko morbiditas (kondisi sakit) yang tinggi dan mortalitas (jumlah kematian rata-rata). Berkaitan dengan meningkatnya risiko dan angka kesakitan tersebut, stunting juga menyebabkan gangguan fisik maupun fungsional pada anak. Stunting berkontribusi 14,5% terhadap kematian dan 12,6% terhadap gangguan kemampuan fungsional (*disability adjusted life years*) pada anak balita (*The lancet's series*, 2008). Indikator antropometri (ilmu yang mempelajari tubuh manusia) dan kekurangan gizi dapat diindikasikan pada berat badan yang kurang dan tinggi badan yang pendek (tinggi yang kurang pada umur normal) sehingga berdampak pada tumbuh kembang anak, maka dari itu perbaikan gizi

pada anak sangat penting dilakukan. Berdasarkan hasil studi OECD PISA (Program Mahasiswa Internasional OECD penilaian) menunjukkan pertumbuhan normal, sel-sel otak mereka berkembang dan cabang sel yang panjang. Gizi yang kurang berdampak pada efek jangka menengah pada anak dan ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kecerdasan dan kemampuan kognitif pada anak karena pada saat itu pertumbuhan normal sel-sel otak dan berkembang sehingga mempengaruhi tingkat intelektual anak. (OECD PISA 2020)

Aceh merupakan salah satu Provinsi angka prevalensi stunting di Indonesia. Pada tahun 2018, Riset Kesehatan Dasar Indonesia disebutkan bahwa angka stunting di Aceh menduduki posisi ke-31 dari 34 Provinsi Kabupaten/kota di Indonesia yang menempati peringkat ketiga tertinggi dengan persentase 37,3% di bawah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat.

Jumlah Balita Stunting Tahun 2022 Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber : Dinas Kesehatan Aceh 2022

Gambar 1 : Jumlah Balita Stunting Aceh Tahun 2022

Berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022 di Provinsi Aceh rata-rata terdapat 1.179 anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting. Artinya, kira-kira 1 dari 3 balita di Provinsi Aceh memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya. Terdapat 2 wilayah di Provinsi Aceh dengan prevalensi balita stunting tertinggi yaitu Kabupaten Aceh besar (4.220 balita) dan Kabupaten Aceh Timur (3.532 balita). Sedangkan Kota Langsa tercatat sebagai wilayah dengan

prevalensi balita stunting terendah di Serambi Mekah, yakni sebesar 132 balita. Pada tahun 2022 terdapat 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan rata-rata prevalensi stunting balita di bawah provinsi, sedangkan 12 kabupaten/kota lainnya memiliki prevalensi di bawah rata-rata kabupaten.

Kabupaten Simeulu merupakan sebuah Kabupaten yang ada di Aceh. Kabupaten Simeule menjadi salah satu daerah prevalensi stunting tertinggi hal ini di keketahui berdasarkan Hasil rilis yang diterima Serambinews.com, data Rikesdas

tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Simeulue berada di tingkat ke 11 dari 23 kabupaten/kota provinsi Aceh. (Rikesdas tahun 2022)

Berdasarkan riset tersebut dapat menunjukkan bahwa angka stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Simeulue dengan persentase 22 persen atau sebanyak 1.028 orang balita dan bayi yang didera stunting, sehingga membutuhkan pemulihan dan penanganan yang ekstra (TPPS, 2022).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan salah satu instansi pemerintah yang terlibat dalam pencegahan stunting di Kabupaten Simeulue, hal ini di lihat dari berbagai rangkaian kegiatan yang selama ini dilakukan salah satunya adalah dengan mengaktifkan peran Bina keluarga Balita di setiap desa yang ada di Kabupaten Simeule. Kemudian DP3AKB juga bertugas melakukan penyuluhan, pencegahan dan pengasuhan serta memberikan bantuan sosial makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita melalui program DAPUR SEHAT, hal ini dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting.

Berdasarkan data di atas, program pencegahan stunting juga melibatkan peran serta seluruh elemen sebagai penanggung jawab, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang berdiri di Kabupaten Simeulue sejak 18 tahun lalu. Sejak berdiri lembaga ini telah banyak berkiprah di masyarakat, baik dalam hal pengarusutamaan gender dengan tujuan agar perempuan di Kabupaten Simeulue dapat berkiprah di segala bidang setara dengan laki-laki. Begitu juga dengan pelayanan KB yang memberikan sasaran hingga ke pelosok desa-desa terpencil di Kabupaten Simeulue. Kegiatan lain dari organisasi ini adalah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan, melindungi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

Melihat dari hasil data di atas maka peneliti membuat perbandingan dimana adanya persamaan dalam pencegahan

stunting. Namun demikian peneliti melakukan penelitian di Dinas DP3AKB kabupaten Simeulue dengan judul Efektivitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Simeulue.

Keberhasilan Program Pencegahan Stunting dapat dilihat jika efektivitas program mengacu pada ukuran efektivitas suatu program yang telah disusun. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu program dapat dikatakan efektif apabila upaya atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan sumber daya, infrastruktur, tepat sasaran, alat dan perlengkapan pendukung. Oleh karena itu efektivitas dapat dijadikan tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas program pencegahan stunting dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan kesehatan. Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Seperti halnya program pencegahan stunting, dapat dikatakan efektif jika dapat mencegah stunting itu sendiri (Duncan at all 2010).

Berdasarkan kajian diatas penelien serupa pernah dilakukan oleh Ayu (2020) dengan hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sudah di laksanakan sesuai dengan ukuran-ukuran efektivitas program secara efektif, akan tetapi masih belum optimal. Kajian serupa juga dilakukan oleh BERNADO (2022) dengan hasil temuan menunjukkan bahwa Kinerja dari aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sejauh ini sudah berjalan dengan baik dalam aspek produktivitas ,kualitas layanan dan responsibilitas sedangkan dalam aspek responsivitas dan akuntabilitas memang sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi. Hal ini sebagaimana teori Nurjannah

Noci, (2017) yang mengatakan bahwa efektivitas program merupakan capaian yang di peroleh atau kondisi akhir output dari suatu pekerjaan atau program, dengan kata lain sebagai suatu pengukuran akan tercapainya target atau tujuan secara matang yang telah di rencanakan sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). (Darteh E.K., Acquah E. dan Kyereme A.K. 2014)

Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas anak di masa depan. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. (Fikadu T., Assegid S., dan Dube L. 2014)

Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Pencegahan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap: (1) pangan bergizi (makanan); (2) lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan); (3) akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan

pengobatan (kesehatan), serta; (4) kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut secara langsung mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. (Kumpan.Com. 2021)

Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Untuk mengatasi penyebab stunting diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup: (a) komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan; (b) keterlibatan pemerintah dan lintas sektor; dan (c) kapasitas untuk melaksanakan. (Sutarto, 2016)

Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan (74-87%) dan faktor pendapatan keluarga (4-7%). Hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan yang mendukung dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, dan kondisi tinggi badan anak bukan permasalahan genetik/keturunan. Kekurangan gizi pada usia dini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi yang berlangsung lama sejak anak usia dini menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Efektivitas

Menurut Lysa dan Yusliati (2018) bahwa secara umum “Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Menurut Nonci (2017) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah seperangkat indikator yang bermakna tentang target pada suatu program, atau tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, dan diusahakan agar terealisasi dengan baik”.

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Subkhi (2013:247) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor-faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum.

b. Integrasi.

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkatkemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi.

c. Adaptasi.

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan, dan sarana dan prasarana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan Pada Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten simeulue. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan yaitu Bulan September 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah adalah metode (Sugiyono :2016). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Data yang dilakukan adalah analisis, maka dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh yaitu pertama, teknik interview (wawancara) dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Simeulue. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten simeulue. observasi yang dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung kelapangan untuk melihat bagaimana kondisi dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Simeulue, dokumentasi yang berupa pengumpulan data yang berupa foto, gambar, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan stunting di Kabupaten Simeulue yang dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan medias sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Simeulue

Dalam melakukan kajian dan analisis efektivitas program percepatan penurunan stunting, penulis perlu memahami konsep efektivitas program dalam General Encyclopedia of Administration, efektifitas berasal dari kata kerja effective, artinya akibat yang diinginkan terjadi dalam suatu tindakan sehingga efektivitas merupakan elemen kunci untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, 2014)

Keberhasilan Program Pencegahan Stunting dapat di lihat apabila Efektivitas Program berjalan mengacu pada ukuran-ukuran efektivitas program sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam (Steers 1985:53) Pencapaian Tujuan,

Integrasi dan adaptasi Adapun indikator dari pencegahan stunting di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan

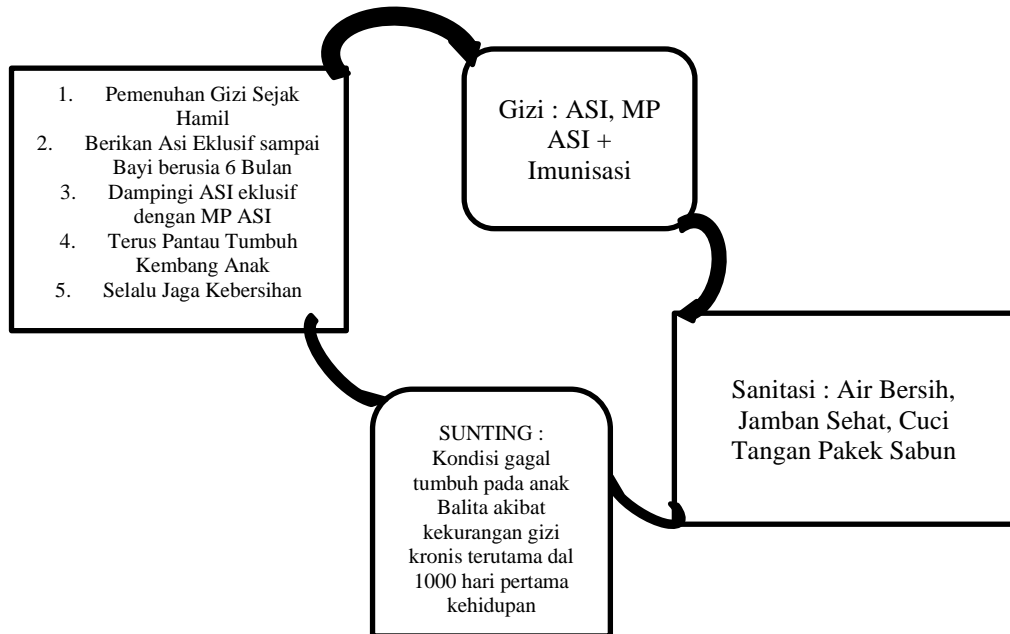
Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian tujuan yang diperlukan untuk mengatasi stunting meliputi upaya pencegahan dan pengurangan gangguan langsung (intervensi gizi spesifik) seta gangguan tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Upaya intervensi gizi khusus difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan, karena pencegahan stunting paling efektif pada 1.000 HPK. Kegagalan tumbuh kembang (growth faltering) akan menyebabkan seorang anak bertubuh pendek, proses ini dimulai sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, status kesehatan dan gizi ibu hamil berperan penting dalam pencegahan stunting. Perbaikan gizi dan kesehatan ibu sangat erat kaitannya dengan pendapatan keluarga dalam memenuhinya, sehingga

program-program yang dilakukan oleh DP3AKB nantinya akan terintegrasi.

Strategi dalam pecapain tujuan perlu dilakukan program pemantauan pencegahan dan pengendalian stunting bersama yaitu :

- danya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- danya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pencegahan stunting telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- adanya evaluasi hasil pelaksanaan program.
- adanya keluhan dan menyelesaikan masalah.
- adanya laporan hasil kegiatan.
- adanya pengembangkan rencana untuk memantau pelestarian dan penggunaan hasil kegiatan.

Dibawah ini merupakan bentuk gambar dari ilustrasi dalam pencegahan stunting yang harus dilakukan :



Gambar 2 : Ilustrasi dalam pencegahan stunting

1 . Penuhi gizi sejak hamil

Sejak ibu mengandung maka tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dalam pencegahan stunting

ialah menjaga pola makan dan minum untuk kebutuhan masa pertumbuhan bayi sejak didalam kandungan. Maka hal tersebut menjadikan cara dalam

pengecahan stunting terhadap anak agar tidak terjadinya stunting terhadap anak.

2. Memberikan Asi Eksklusif kepada bayi sampai usia 6 bulan

Asi merupakan makan dan minuman utama bagi bayi sejak usia 0-23 bulan yang wajib diberikan oleh ibu menyusui. Asi yang diberikan oleh ibu juga harus mengandung gizi sehingga anak yang diberikan asi mendapatkan asupan protein, asi ibu pun mampu meningkatkan kekebalan tubuh pada anak. Setelah bayi berusia 6 bulan, asi yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehingga harus diberikan makanan pendamping kepada bayi yang kaya akan kandungan gizi dan zat besi untuk masa pertumbuhan bayi agar tidak terjadinya stunting sejak masa dini.

3. Pemberian Makanan Pendamping Asi dan Asi Eksklusif kepada anak

Jika bayi telah meranjak umur lebih dari 6 bulan, ibu yang menyusui hendakla memberikan asupan makan sebagai tambahan dari asi. Makanan

yang diberikan merupakan makanan pilihan yang juga mengandung manfaat lebih serta bisa menjaga kekebalan tubuh pada bayi agar tidak terjadinya stunting pada bayi.

4. Terus memantau tumbuh kembang anak

Tumbuh kembang pada anak harus terus dipantau oleh orang tua, terutama tinggi badan dan berat badan anak serta membawa anak ke posyandu, sehingga akan lebih mudah Ibu mengetahui gangguan apa saja yang dapat menyebabkan kendala pada masah tumbuh pada anak.

5. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan sangatlah penting untuk dijaga dan diperhatikan kualitas kebersihannya. Anak-anak pada masa proses pertumbuhan sangat rentan akan terkena serangan penyakit sehingga faktor lingkungan yang tidak sehat tersebut secara tidak disadari dapat mengakibatkan peluang terjadinya stunting.

Jumlah balita, ibu hamil, dan jumlah ibu bersalin di Kabupaten Simeulue Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Balita	Jumlah ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin
1	Teupah Selatan	672	144	109
2	Teupah Tengah	511	94	90
3	Simeulue Timur	2262	382	378
4	Teupah Barat	438	106	98
5	Simeulue Tengah	556	99	85
6	Teluk Dalam	491	57	44
7	Salang	752	91	93
8	Simeulue Barat	1001	140	117
9	Alafan	465	214	112
10	Simeulue Cut	261	90	83
Total		7409	1417	1209

Sumber : Data Dinas Kesehatan Simeulue (2022)

Berdasarkan data diatas pada tahun 2022 dari 10 kecamatan, jumlah balita, jumlah ibu hamil, dan jumlah ibu bersalin yang ada di Kabupaten Simeulue dapat disimpulkan bahwa kecamatan simeulue timur merupakan kecamatan yang memiliki jumlah terbanyak sebesar 2262 balita, 382

ibu hamil dan 378 ibu bersalin. Sedangkan dari segi terkecil, kecamatan Simeulue cut adalah kecamatan yang memiliki 261 balita. Tetapi dari sisi jumlah ibu hamil dan bersalin terdapat pada kecamatan salang dengan jumlah di bawah 100 orang.

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa Untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah, untuk keberhasilan kegiatan tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai pihak serta melakukan persiapan secara maksimal dan terarah. Hal ini sebagaimana teori Budiani (2007: 52) mengatakan mengenai ukuran efektivitas Program diantaranya adalah 1) Ketepatan Sasaran: yaitu kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke sasaran atau target sesuai dengan kemampuannya yang berkaitan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. 2). Sosialisasi Program: yaitu penyampaian informasi tentang pelaksanaan program, dengan penyampaian informasi yang jelas sehingga program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 3). Tujuan Program: yaitu sejauh mana hasil data program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 4. Pemantauan Program: yaitu pemantauan suatu program yang sudah terlaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya.

b. Integrasi

Membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Untuk membangun suatu kepercayaan diantara pemangku kepentingan yang terlibat diperlukan suatu peran kepemimpinan fasilitatif untuk dapat mengakomodir para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat dilihat jika satu pihak memerlukan pihak lain untuk melancarkan keinginan dan tujuan yang hendak di capai.

Berikut Contoh ilustrasi pemangku kepentingan dapat dilihat pada gambar diatas dapat dilihat bahwa berjalannya suatu kegiatan yang hendak dicapai membutuhkan seorang pimpinan yang mengarahkan dan memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue beliau mengatakan bahwa :

“Dalam percepatan penurunan angka stunting itu, dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat, maka pihak pemerintah daerah, melakukan upaya serius secara kontinyu dan menyeluruh di 138 desa dalam 10 kecamatan, termasuk dengan melibatkan organisasi Darma Wanita, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan serta organisasi dan pemerintahan tingkat desa” (Hasil wawancara, 17 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam proses kolaborasi berarti meyakini bahwa negosiasi memiliki itikad baik dalam mengembangkan potensi keuntungan bersama dan merupakan cara terbaik dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam suatu komitmen pada proses kolaborasi perlu juga untuk membangun kesadaran adanya saling ketergantungan satu sama lain diantara pemangku kepentingan. Semakin tergantung suatu aktor, maka akan semakin berkomitmen pihak itu terhadap hubungan yang dijalin (Abbad, dalam La Ode, 2018).

Menurut Riant Nugroho (2014:101) mengemukakan bahwa “Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batasbatas kebijakan itu sendiri”. perumusan kebijakan (policy formulatin) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Sedangkan menurut Winarno (2014: 29) menyatakan bahwa “masingmasing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Berdasarkan hasil diatas sama halnya dengan penelitian sebelumnya yaitu Fatris Rudmini, (2021), dengan hasil penelitiannya yakni penanggulangan stunting pada anak balita oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue sudah cukup baik serta terukur dengan bisa diperhatikan dari kejelasan visi, misi, tujuan, sasaran serta program-program penanggulangan stunting. Normaisa (2020) Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan bisa diambil kesimpulan jika, strategi organisasi, strategi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Enrekang terkhusus Dinas Kesehatan dalam hal mengurangi penderita stunting ialah dengan membuat program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)serta GEMPITA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Dinas Kesehatan.

Berdasarkan data tersebut diatas perumusan kebijakan secara integrasi harus segera terbentuk hal ini demi kepentingan generasi dimasa yang akan datang dimana generasi yang akan datang menjadi generasi yang lebih cerdas dan tumbuh kembang dengan baik.

c. Adaptasi

Dapat dilihat bahwa efektivitas kinerja DP3AKB dalam pencegahan stunting di Kabupaten Simeulue dapat membangun kesadaran dan saling ketergantungan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan harus percaya bahwa lebih baik untuk memproses bersama dari pada secara individual. Di masyarakat ditemukan bahwa saling ketergantungan muncul karena adanya perbedaan potensi kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam proses penanganan stunting.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan kbid di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dinas Pemebrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue beliau mengatakan bahwa:

“Dalam percepatan penurunan angka stunting kami bertanggung jawab di bidang penyuluhan, pencegahan dan pola asuh kepada

masyarakat melalui 1). Penyuluhan bina keluarga balita (BKB) yaitu penyuluhan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak-anak balita. 2). Ada penyuluhan kepada Pik Remaja (pusat informasi dan konseling remaja) yaitu tentang konseling kepada remaja tentang bahaya narkoba, alat reproduksi, bahaya merokok dll tentang remaja, kemudian BKR (bina keliarga Remaja) yaitu penyuluhan terhadap ibu-ibu yang mempunyai remaja dan mengadakan kegiatan Poktan yaitu kelompok kegiatan seperti usaha UPPKA untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Sejahtera seperti memasak kue, dll” (Hasil wawancara, 17 November 2022).

Melihat kondisi stunting di Kabupaten Simeulue, sejauh ini ada temuan bayi yang dinyatakan sebagai anak balita penyandang stunting. Hal ini diketahui dengan adanya kegiatan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan oleh pihak Posyandu yang tersebar diseluruh desa dengan satu orang bidan Desa, satu orang perawat Desa dan dibantu oleh para kader-kader Posyandu dalam penanganan stunting.

Adapun di Kabupaten Simeulue di setiap desa terdapat satu kader kesehatan yang bertugas untuk menangani stunting dimana lingkup kerjanya. Meski demikian hal ini masih dalam pertimbangan pemerintah, untuk penambahan kader yang nantinya disebarkan di titik-titik tertentu, hal ini masih dalam kajian pemerintah masing-masing untuk penanganan bayi yang terkena stunting. Kepada setiap bayi yang lahir di Kabupaten Simelue akan terus diperiksa dan dievaluasi melalui kegiatan rutin diposyandu. Namun hal demikian masih ada kendala dari kesadaran orang tua untuk membawa bayinya ke Posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemebrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, beliau mengatakan bahwa: *“Berbagai program pencegahan stunting telah kami lakukan setelah bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Organisasi Dharma Wanita, sangat efektif dalam pencegahan stunting di Kabupaten Simeulue. Sementara itu, dalam penanganan stunting di Kabupaten Simeulue telah dibentuk tim yaitu*

dari tahun 2019-2021 yang disebut sekretariat bersama (sekber) dan pada tahun 2022 tim penanganan stunting telah berubah menjadi tim percepatan penurunan stunting (tpps)” (Hasil wawancara, 16 November 2022).

Di sisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Bappeda Simeulue yang juga tergabung dalam tim penanggulangan stunting. Ia mengatakan bahwa :

“Ada beberapa program yang kami jalankan selama ini untuk menekan angka stunting di kabupaten Simeulue, diantaranya adalah program gizi dapur yang terealisasi secara maksimal karena kami terus melakukan sosialisasi melalui kader posyandu kami dan ada kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terkait dengan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pencegahan stunting, telah memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada evaluasi hasil pelaksanaan program, pengaduan dan penyelesaian masalah, ada laporan tentang hasil kegiatan dan ada rencana yang dikembangkan untuk memantau pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan” (Hasil wawancara, 17 November 2022).

Kemudian hal yang sama juga di katakan oleh kepala Dinas Kesehatan yaitu beliau mengatakan bahwa :

“Ada beberapa program yang selama ini diamanahkan kepada kami dan ada yang sudah terlaksana dan ada yang belum, saat ini kami hanya menjalankan program sosialisasi dan makanan tambahan untuk balita” (Hasil wawancara, 18 November 2022).

Kemudian disisi lain peneliti juga melakukann wawancara dengan Organisasi Dharmawanita yaitu salah satu pegawai yang juga termasuk tim penangan stunting beliau mengatakan bahwa :

“kami sudah banyak melakukan sosialisasi masalah stunting baik di kecamatan maupun di desa-desa, serta masalah penangan gizi lengkap, untuk mencegah stunting sudah banyak dilakukan” (Hasil wawancara, 16 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa, pihak Kabupaten terus melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait penanganan percepatan penurunan stunting melalui pengisian table scorecard yang telah disediakan oleh pemerintah. upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua juga perlu untuk ditingkatkan. Petugas posyandu juga perlu untuk melakukan monitoring secara rutin terhadap suplai gizi balita sebagai upaya untuk mencegah stunting. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kesehatan masyarakat khususnya bayi-bayi yang ada di Kabupaten Simeulue akan terus terjaga, dan nanti tidak ada lagi penambahan kasus stunting di Desa.

Diperlukan pemahaman bersama mengenai target dari program untuk mewujudkan keberhasilan dalam menangani permasalahan stunting. Selain itu, pada tahap ini juga penting untuk berbagi pengetahuan dan informasai terkait masalah stunting agar para pemangku kepentingan yang terlibat dapat mengetahui secara mendasar terkait informasi stunting. Dalam konteks ini pemahaman bersama dilakukan melauai dialog tatap muka (*face to face dialogue*). Hal itu dilakukan untuk dapat menganalisa masalah-masalah stunting mulai dari penyebab stunting, cara pencegahan serta penanggulangannya. Dengan pemahaman yang selaras diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat maka akan dapat memudahkan keberhasilan dalam proses kolaborasi. Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Wawan (2016) yang mengatakan bahwa pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam linkup kerja dan jabatannya. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari kejelian dan ketepatan dalam proses menentukan seorang pegawai untuk

berada dalam suatu pekerjaan dan jabatan tertentu. Pegawai yang mampu melakukan pekerjaan tertentu mungkin akan lebih tepat dan baik jika dia ditempatkan pada bidang tertentu juga. Orang yang tepat di tempat yang tepat akan membawa suatu organisasi pada hasil kinerja yang maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam tugas atau pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).

Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Berapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi.

Setelah serangkaian pertemuan kelompok kecil (refleksi kelembagaan) dalam upaya menggugah kesadaran kritis terhadap pentingnya sebuah saluran komunikasi antar kelembagaan lokal yang representatif, setara, aspiratif serta membelajarkan dan dapat menjadi pusat peningkatan kapabilitas dalam pencegahan stunting, maka disusunlah agenda rembuk kelembagaan yang membahas: a. Peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku konvergensi; b. Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS); dan c. Penyelesaian mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja RDS.

Berdasarkan data diatas dalam adaptasi program sebagaimana teori yang di ungkapkan Sunggono (1994: 149-154) mengemukakan Upaya Efektivitas program, sebagai berikut: 1) Isi Kebijakan: yaitu upaya dalam mengatasi hambatan tentang isi kebijakan bahwa isi kebijakan perlu adanya beberapa faktor pendukung untuk melihat keberhasilan suatu program yang diimplementasikan yaitu, kepentingan dari isi kebijakan program tersebut karena suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh kepada pengimplementasiannya. 2) Informasi:

dalam mengatasi hambatan komunikasi cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan tindakan dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai pesyaratan, tujuan menghilangkan pilihan dari multi interpretasi atau penafsiran informasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terperinci. 3) Dukungan: yaitu proses implementasi tentu harus adanya dukungan untuk mengatasi hambatan diatas, salah satunya yaitu fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. 4) Pembagian Potensi: yaitu upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil diatas sama halnya dengan penelitian sebelumnya yaitu Rini Archda Saputri, (2019). Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hal-hal yang dapat dirubah supaya program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik lagi dalam proses penurunan stunting ialah melalui cara melaksanakan pendataan dengan cara terpadu agar kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai serta efektif dalam menurunkan serta menanggulangi stunting.

KESIMPULAN

Pencapaian Tujuan dilakukan dengan program pemantauan pencegahan dan pengendalian stunting bersama yaitu adanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, adanya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pencegahan stunting telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, adanya evaluasi hasil pelaksanaan program, adanya keluhan dan menyelesaikan masalah, adanya laporan hasil kegiatan, adanya pengembangan rencana untuk memantau pelestarian dan penggunaan hasil kegiatan

Integrasi dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat, maka pihak pemerintah daerah, melakukan upaya serius secara kontinyu dan menyeluruh di 138 desa dalam 10 kecamatan, termasuk dengan melibatkan organisasi Darma Wanita, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan serta organisasi dan pemerintahan tingkat desa.

Adaptasi dilakukan dengan membangun kesadaran melalui Penyuluhan bina keluarga balita (BKB) yaitu penyuluhan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak-anak balita. penyuluhan kepada Pik Remaja (pusat informasi dan konseling remaja) yaitu tentang konseling kepada remaja tentang bahaya narkoba, alat reproduksi, bahaya merokok dll tentang remaja, kemudian BKR (bina keliarga Remaja) yaitu penyuluhan terhadap ibu-ibu yang mempunyai remaja Ombudsman.

REFERENSI

- Antara Kalsel. (2020, Maret). Desa Peduli Stunting – Anak Sehat Untuk Masa Depan Hebat. Diambil dari <https://www.google.com/amp/s/kalse1.antaranews.com/amp/berita/152070/desa-peduli-stunting-anaksehat-untuk-masa-depan-hebat>
- Budiani, Ni Wayan. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “EKA TARUNA BHAKTI” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Input Jurnal Ekonomi Sosial*.
- Fatris Rudmini, (2021). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita Di Kabupaten Simeulue. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar*.
<https://dinkes.batam.go.id/2021/03/30/cega-h-stunting-itu-penting>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, D., & Arif, Z. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Normaisa (2020). *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang*
- Ode, S. La. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. Deepublish.
- OECD PISA 2020. *Result Combined Executive Summaries*. PISA/OECD Publishing
- Qanun Kabupaten Simeulue Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Simeulue
- Rini Archda Saputri, (2019). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”.
- Saputri & Tumangger, (2019). *Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
- Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022
- Subkhi dan Jauhar. (2013). *Efektivitas Organisasi*. Bandung: Gramedia
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- The lancet’s series, 2008. *The Lancet’s Series on Maternal and Child Undernutrition Executive Summary*”. Diakses pada 19 Maret 2016 dari www.thelancet.com
- TPPS, 2022. *Panduan percepatan penurunan stunting 2022*

Wardiah, M. L. (2016). Teori Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.

WHO, 2022. WHO. Stunting in nutshell [internet]. World Health Organization. 2015 [cited 2021 Jun 10]. Available from: <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>